



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 532 Sago Kab. Pesisir Selatan
Sumatera Barat 25051

<https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/>
bappedalitbang@mail.pesisirselatankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan.

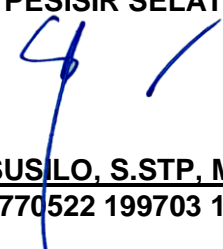
Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029, serta memperhatikan keterpaduan dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional.

Dokumen ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, serta indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari proses pembangunan pada periode sebelumnya, sehingga di dalamnya termuat kesinambungan program dan kegiatan yang disertai dengan langkah-langkah inovatif guna menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah, berkelanjutan, dan inovatif.

PAINAN, SEPTEMBER 2025
**KEPALA BAPPERIDA
KAB. PESISIR SELATAN**


HADI SUSILO, S.STP, M.Si.
NIP. 19770522 199703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH.....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan..... Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	II-1
2.1.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.....	II-4
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan.... Riset, dan Inovasi Daerah	II-7
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	II-20
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan.....	II-20
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan..... Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	II-20
2.2.2 Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset... dan Inovasi Daerah	II-21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan.... Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	III-1
3.1.1 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset..... dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029	III-2

3.1.2 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset..... dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029	III-2
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	III-9
3.2.1 Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset..... dan Inovasi Daerah	III-9
3.2.2 Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan..... Riset, dan Inovasi Daerah	III-10
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN..... KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	IV-1
4.1.1 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati dan..... Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029	IV-41
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	IV-45
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan..... Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	IV-46
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci.....	IV-47
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Tenaga Honorer Berdasarkan Tugas yang Diemban.....	II-5
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Penunjang.....	II-6
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan..... Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan..... Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	II-16
Tabel 2.5	Perumusan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan..... Riset, dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029	II-22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan..... Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	III-3
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan..... Tahun 2025-2029	III-9
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan..... Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan..... Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	IV-14
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program..... Prioritas Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	IV-36
Tabel 4.4.	Matrik Keselarasan Program Prioritas RPJMD dan..... Renstra Bapperida	IV-40
Tabel 4.5	Matrik Keselarasan Program Pro Rakyat RPJMD dan..... Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	IV-41
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan..... Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	IV-46
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan..... Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029	IV-47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra..... Perangkat Daerah	I-2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bapedalitbang.....	II-3
Gambar 3.1	Cascading.....	III-8

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan.....	II-4
Grafik 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	II-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat Daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Renstra Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan. Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baperida diperlukan suatu dokumen rencana strategis, yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang serta merupakan komitmen Baperida. Renstra sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Baperida dengan mempertimbangkan pencapaian visi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu ***“Pesisir Selatan***

"Maju, Tumbuh, dan Berkelanjutan" dan misi 1 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.

Proses penyusunan Renstra Baperida Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, penyusunan Rancangan akhir, hingga penetapan, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bapedalitbang Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, serta Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.7.2.2/21/Bapedalitbang/2025, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar .1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Bapedalitbang Tahun 2025–2029 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan : 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *Logical Framework*; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan,

Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029., 4) Penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi; dan 5) Keterkaitan Renstra Baperida dengan Renstra Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Baperida juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Baperida Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Baperida adalah melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bapedalitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Baperida adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJMD dan Penetapan Indikator RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi dan peran Baperida sebagai institusi Perencanaan Pembangunan dalam mencapai target RPJMD.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Baperida Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1. Sub Bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.2. Sub Bab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III Tujuan, Strategi, Sasaran dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat

Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Berisi tentang penutup Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dimana Baperida merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta Riset dan Inovasi yang dipimpin oleh Kepala Badan dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
4. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Struktur Organisasi

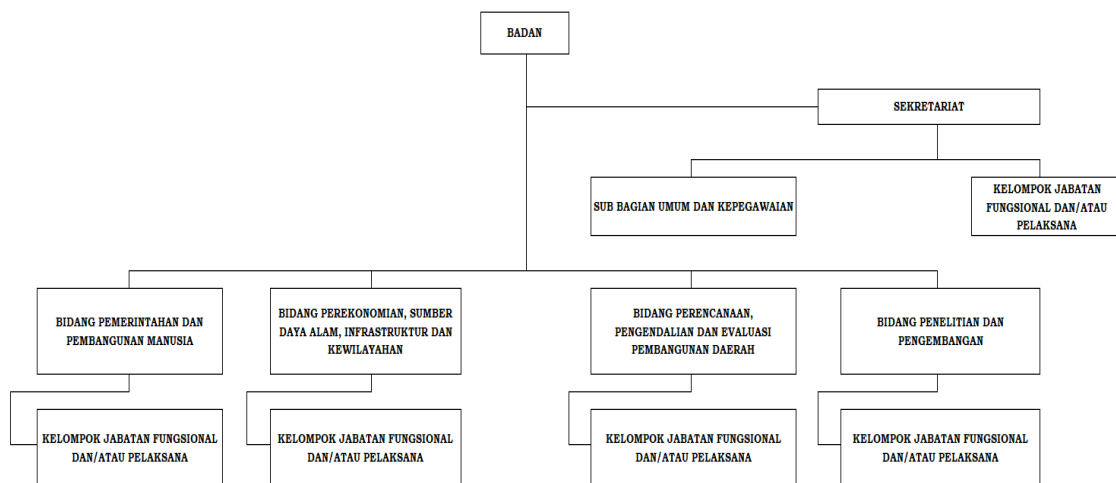
Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 terdiri dari :

1. Kepala Badan, bertugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.
2. Sekretariat, Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan pengkoordinasian program dan pelaporan Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dikoordinir oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dikoordinir oleh seorang Kepala Bidang, yang bertugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dikoordinir oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan program/kegiatan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, dikoordinir oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Badan melaksanakan penelitian dan pengembangan serta Riset dan Inovasi Daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.

Secara lengkap Struktur Organisasi Baperida Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BAPEDALITBANG



2.1.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

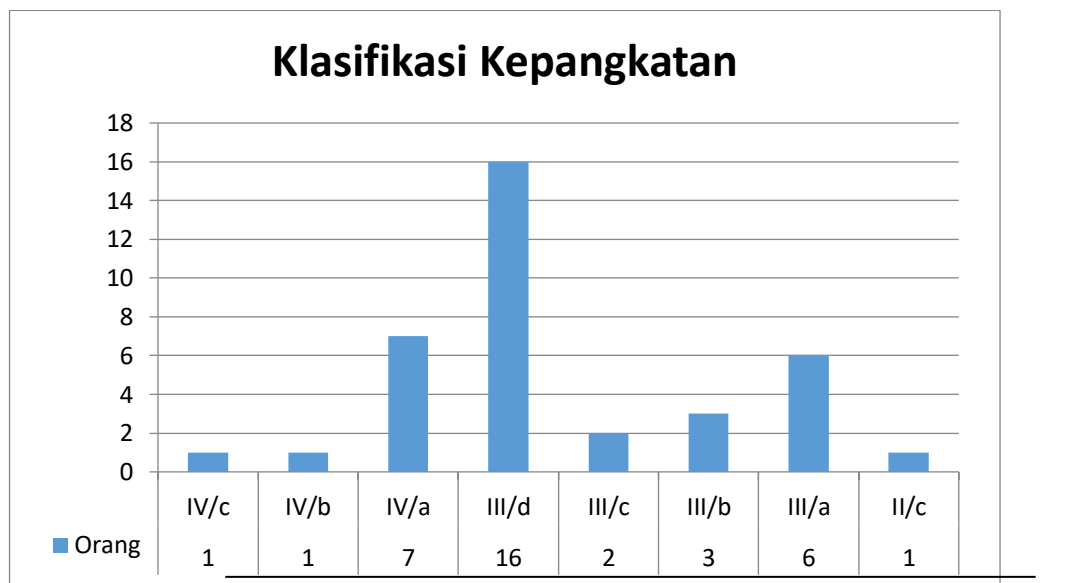
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki sumber daya dan sarana prasarana yang menunjang pencapaian tugas dan fungsinya.

Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 48 orang, dengan rincian :

1. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 orang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 36 orang dengan klasifikasi berdasarkan kepangkatan dan pendidikan seperti grafik di bawah ini :

Grafik 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

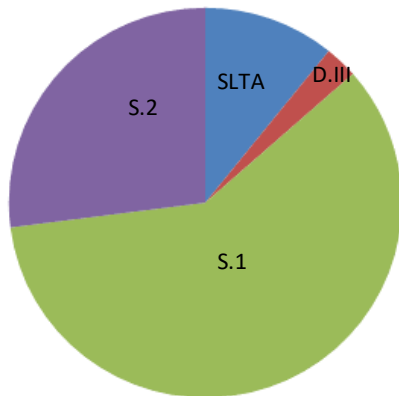


Berdasarkan grafik 2.1 diatas bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kepangkatan didominasi oleh Penata Tk. I (III/d) berjumlah 16 orang atau 44,44 persen dan Pembina (IV/a) berjumlah 7 orang atau 19,44 persen dari jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 orang.

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 orang terdiri dari Pejabat Struktural Esselon II, Esselon III, Esselon IV, Fungsional Tertentu Madya, Muda, Pertama, Terampil dan Pelaksana.

Grafik 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Klasifikasi Pendidikan



Selain klasifikasi kepangkatan, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan pendidikan seperti Grafik 2.2 di atas. Dilihat dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil rata-rata berpendidikan Strata 1 (S.1) sebesar 61,11 persen.

2. Tenaga Honorer

Selain Pegawai Negeri Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga dibantu oleh Tenaga Honorer berjumlah 12 orang, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Tenaga Honorer Berdasarkan Tugas yang Diemban

No	Tugas Yang Diemban	Jumlah
1	Penata Layanan Operasional	9
2	Pengadministrasi Perkantoran	3
Jumlah		12

Tenaga honorer tersebut diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Badan.

3. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Penunjang

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
A.	<u>Bangunan Gedung</u>		
1.	Gedung Kantor	2	Baik
2.	Pagar Gedung Kantor	1	Baik
3.	Bangunan Parkir Roda 4 dan Roda 2	3	Baik
4.	Ruangan Genset	1	Baik
5.	Bangunan Merek Kantor	1	Baik
B.	<u>Fasilitas Kantor</u>		
1.	Ruang Tempat Ibadah	1	Baik
2.	Ruang Rapat	2	Baik
3.	Ruang Kepala	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepala Bidang	4	Baik
6.	Ruang Keuangan	1	Baik
7.	Meja Kerja	59	Baik
8.	Meja Rapat	23	Baik
9.	Kursi Tamu	6	Baik
10.	Kursi Kerja	25	Baik
11.	Kursi Rapat	6	Baik
12.	Sofa Tamu	2	Baik
13.	Mesin Fax	1	Baik
14.	Komputer/PC	15	Baik
15.	GPS	5	Baik
16.	Alat penghancur kertas	2	Baik
17.	UPS	4	Baik
18.	Mesin potong rumput	2	Baik
19.	Genset	3	Baik
20.	Lemari Besi	20	Baik

21.	Filling Kabinet	5	Baik
22.	AC	32	Baik
23.	Lemari piring	2	Baik
24.	Wireless outdoor	3	Baik
25.	Laptop	20	Baik
26.	IPAD	5	Baik
27.	Proyektor/Infocus	8	Baik
28.	Hard Disk External	7	Baik
29.	Printer	26	Baik
26.	Software/ Aplikasi	3	Baik
27.	Drone	1	Baik
28.	Jalan khusus kantor	2	Baik
29.	Running teks	1	Baik
30.	Lemari Es	1	Baik
31.	Instalasi jaringan elektronik	1	Baik
C.	<u>Kendaraan Dinas</u>		
1.	Kendaraan Roda 4	3	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	6	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan dan di Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Riset dan Inovasi Daerah.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat ditinjau dari beberapa

aspek, antara lain : 1. Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pada Peraturan Daerah Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi; 2. Mekanisme Perencanaan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (Participatory Planning).

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari.

Hasil Kinerja Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain: a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJPD) b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum OPD, Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir

Selatan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan; d. Dokumen Perencanaan Teknis Antara lainnya e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten maupun forum Satuan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2020-2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Table 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja				NA	23	25	24.8	24.42	NA	24.11	24.15	24.25	24.19	NA	104.83%	96.60%	97.78%	99.06%
2.	Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran kinerja				NA	NA	NA	18.4	18.33	NA	NA	NA	17.98	18.05	NA	NA	NA	97.72%	98.47%
3.	Nilai AKIP Bapedalitbang				A	A	A (89)	A (90)	AA (90,1)	A	A	A (89,96)	A (89,93)	AA (90,43)	100%	100%	101.08%	99.92%	100.37%
4.	Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan dalam dokumen perencanaan				NA	NA	NA	90	90	NA	NA	NA	90	90	NA	NA	NA	100%	100%
5.	Nilai kematangan Inovasi Bapedalitbang				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	97	97	NA	NA	NA	97%	97%
6.	Indeks Inovasi Daerah				NA	49.34	60.02	62.32	62.52	NA	49.34	51.62	58.34	59.26	NA	100%	86.00%	93.61%	94.79%

A. Analisis Deskriptif Data Capaian Kinerja 2020-2024

1. Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja

- Target vs Realisasi:
 - 2021: Target 23, realisasi 24.11 (rasio 104.83%) → Melebihi target.
 - 2022: Target 25, realisasi 24.15 (rasio 96.60%) → Di bawah target.
 - 2023-2024: Target ~24.8-24.42, realisasi ~24.25-24.19 (rasio 97-99%) → Hampir mencapai target.

- Analisis:

Capaian di atas target (2021) menunjukkan perencanaan efektif, tetapi penurunan rasio (2022-2024) mengindikasikan perlunya evaluasi proses perencanaan atau faktor eksternal seperti perubahan kebijakan.

2. Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran Kinerja

- Target vs Realisasi:

2023-2024: Target ~18.4-18.33, realisasi ~17.98-18.05 (rasio 97-98.5%) → Hampir tercapai.
- Analisis:

Rasio yang stabil menunjukkan konsistensi sistem pengukuran, tetapi belum 100% berarti ada ruang untuk peningkatan akurasi atau metodologi.

3. Nilai AKIP Baperida

- Target vs Realisasi:

2020-2024: Selalu mencapai predikat "A" atau "AA" dengan rasio 99-101%.
- Analisis:

Predikat konsisten mencerminkan kematangan sistem akuntabilitas, dan peningkatan ke "AA" (2024) menunjukkan perbaikan berkelanjutan.

4. Persentase Kajian Kelitbangan yang Diterapkan

- Target vs Realisasi:

2023-2024: Target 90%, realisasi 90% (rasio 100%) → Tercapai sempurna.

- Analisis:
Capaian 100% menunjukkan integrasi kajian ke dalam perencanaan berjalan optimal, mungkin didukung oleh SOP yang jelas.

5. Nilai Kematangan Inovasi Baperida

- Target vs Realisasi:
2023-2024: Target 100, realisasi 97 (rasio 97%) → Hampir sempurna.
- Analisis:
Rasio 97% menunjukkan tingkat adopsi inovasi yang tinggi, tetapi belum maksimal, mungkin karena resistensi atau sumber daya terbatas.

6. Indeks Inovasi Daerah

- Target vs Realisasi:
 - 2021: Target 49.34, realisasi 49.34 (rasio 100%) → Tercapai.
 - 2022-2024: Target naik (60.02-62.52), realisasi di bawah target (51.62-59.26) dengan rasio 86-95%.
- Analisis:
Kenaikan target tidak diimbangi realisasi menunjukkan tantangan dalam adopsi inovasi, seperti kurangnya infrastruktur atau kapasitas SDM.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

- Kinerja Terbaik: Kajian Kelitbang (100%) dan AKIP (predikat "AA") adalah contoh keberhasilan implementasi kebijakan dan akuntabilitas.
- Area Perbaikan:
 - Inovasi Daerah: Perlu identifikasi hambatan (misal: anggaran, pelatihan).
 - SAKIP Perencanaan: Evaluasi penyebab penurunan rasio (2022).
- Teori Pendukung:
 - Gunakan Balanced Scorecard (Kaplan & Norton) untuk menyeimbangkan target dan realisasi.
 - Model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk evaluasi menyeluruh tiap indikator.

Catatan: Data NA (Not Available) pada beberapa tahun menunjukkan indikator tersebut belum menjadi prioritas atau baru diimplementasikan kemudian.

B. Analisis Diagnostik Data Capaian Kinerja 2020-2024

(Mengidentifikasi akar masalah dan hubungan antar indikator berdasarkan teori manajemen kinerja dan kebijakan publik)

1. Pendekatan Teoritis

- Analisis diagnostik ini menggunakan kerangka berikut:
 - Mengevaluasi kesenjangan antara target dan realisasi dari aspek input-proses-output.
 - Mengidentifikasi penyebab kegagalan/keterlambatan capaian.
- Menemukan bottleneck dalam proses kinerja.

2. Diagnosa per Indikator

- Nilai SAKIP Komponen Perencanaan (Indikator 1)
 - Gejala:
 - 2021: Melebihi target (104.83%), tetapi 2022-2024 di bawah target (96-99%).
 - Diagnosa:
 - Input: Target 2022 naik signifikan (23 → 25), tetapi realisasi hanya naik 0.04 poin (24.11 → 24.15).
 - Proses: Kemungkinan overestimasi target atau kurangnya sumber daya untuk peningkatan.
 - Perencanaan tidak disertai efisiensi.
- Nilai SAKIP Komponen Pengukuran (Indikator 2)
 - Gejala: Rasio stabil di 97-98.5% (hampir tercapai).
 - Diagnosa:
 - Output: Konsistensi menunjukkan sistem pengukuran sudah baik, tetapi belum maksimal.
 - Akar Masalah: Metrik evaluasi mungkin terlalu kaku atau kurang adaptif.
- Nilai AKIP Baperida (Indikator 3)
 - Gejala: Predikat konsisten "A" hingga "AA" (rasio 99-101%).
 - Diagnosa:

- Proses: Sistem akuntabilitas matang, tetapi peningkatan 2024 (AA) hanya 0.37% dari target.
- Risiko: Complacency (puas diri) karena capaian sudah tinggi.
- Kajian Kelitbangan (Indikator 4)
 - Gejala: Tercapai 100% (2023-2024).
 - Diagnosa:
 - Input: SOP jelas dan sumber daya memadai.
 - Catatan: Target 90% mungkin terlalu rendah jika realisasi selalu 100%.
- Kematangan Inovasi (Indikator 5)
 - Gejala: Rasio 97% (3 poin di bawah target).
 - Diagnosa:
 - Catatan: Inovasi terhambat birokrasi atau kurangnya insentif.
- Indeks Inovasi Daerah (Indikator 6)
 - Gejala: 2021 tepat target, tetapi 2022-2024 rasio turun (86-95%).
 - Diagnosa:
 - Root Cause:
 1. Proses difusi inovasi lambat: Kurangnya sosialisasi atau infrastruktur pendukung.

3. Analisis Cross-Indikator

- Korelasi SAKIP dan AKIP:
 - Komponen perencanaan (Indikator 1) dan pengukuran (Indikator 2) SAKIP belum optimal, tetapi AKIP (Indikator 3) sangat baik.
- Implikasi: Akuntabilitas (AKIP) tidak bergantung sepenuhnya pada perencanaan (SAKIP) → Potensi misalignment.
- Inovasi vs Kajian Kelitbangan:
 - Kajian Kelitbangan (100%) tidak otomatis mendongkrak Inovasi Daerah (rasio turun).
 - Masalah: Kajian mungkin tidak diterjemahkan ke aksi (Teori Knowledge-Action Gap).
- Target vs Realisasi:
 - Pola Umum: Target sering naik drastis (contoh: Indeks Inovasi 2021 → 2022 +10 poin), tetapi realisasi tidak mengikuti.
 - Teori: Target ditetapkan tanpa analisis kapasitas.

4. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan diagnosa:

- Perbaiki Proses Perencanaan:
 - Gunakan SMART Goals untuk menetapkan target (khususnya SAKIP dan Inovasi Daerah).
 - Benchmarking ke instansi lain untuk menilai realistis tidaknya target.
- Penguatan Sistem Pengukuran:
 - Evaluasi metrik SAKIP dengan Balanced Scorecard untuk memastikan alignment dengan AKIP.
- Inovasi dan Kajian Kelitbangan:
 - Buat mekanisme umpan balik untuk memastikan kajian benar-benar dipakai sebagai basis inovasi.
- Manajemen Perubahan:
 - Atasi resistensi inovasi dengan pelatihan dan insentif (Teori Kotter).
- Monitoring Proaktif:
 - Gunakan Dashboard Real-Time untuk deteksi dini kesenjangan (contoh: jika rasio turun di bawah 95%).

5. Kesimpulan

- Masalah Utama: Ketidakrealistisan target dan lemahnya eksekusi (terutama inovasi).
- Solusi Kunci:
 - Revisi target berbasis data historis.
 - Integrasikan perencanaan, pengukuran, dan akuntabilitas dalam satu kerangka kerja.
 - Teori Kunci: Systems Thinking (Senge) untuk melihat kinerja sebagai satu kesatuan, bukan indikator terisolasi.
- Langkah Selanjutnya:
 - FGD dengan pemangku kepentingan untuk validasi akar masalah.
 - Pilot Project perbaikan di satu indikator (misal: Inovasi Daerah) sebelum replikasi.

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan																	
Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	3.558.019.333,00	4.085.154.313,00	4.046.995.988,00	3.872.968.413,00	4.410.681.609,00	3.416.428.705,00	3.443.584.399,00	3.935.891.446,00	3.808.243.596,00	3.684.924.874,00	96,02	84,30	97,25	98,33	83,55	213165569,00	67124042,25
Belanja Barang dan Jasa	2.091.777.347,00	2.299.386.066,00	2.568.666.311,00	2.112.365.839,00	2.703.628.549,00	1.856.731.519,00	1.995.429.398,00	2.392.302.238,00	2.021.978.027,00	2.471.850.261,00	88,76	86,78	93,13	95,72	91,43	152962800,50	153779685,50
Belanja Modal	162.000.000,00	213.356.316,00	34.528.800,00	58.817.310,00	66.506.592,00	155.565.999,00	205.307.000,00	34.037.600,00	56.060.400,00	59.216.780,00	96,03	96,23	98,58	95,31	89,04	-23873352,00	-24087304,75

Analisis Diagnostik Anggaran, Realisasi, dan Pertumbuhan Belanja (2020-2024)

1. Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai pada tahun 2020 sebesar Rp 3.558.019.333,00

menjadi Rp 4.410.681.609,00 pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 852.662.276,00.

- **Anggaran:** Meningkat dari Rp3.56 miliar (2020) ke Rp4.41 miliar (2024), dengan fluktuasi di tahun 2022-2023.
- **Realisasi:** Lebih rendah dari anggaran setiap tahun, dengan gap terbesar di 2021 (hanya 84.3% dari anggaran).
- **Rasio Realisasi/Anggaran:** Menurun dari 96% (2020) ke 83.5% (2024).
- **Pertumbuhan:**
 - Rata-rata pertumbuhan anggaran: Rp213.2 juta/tahun
 - Rata-rata pertumbuhan realisasi: Rp67.1 juta/tahun (hanya 31.5% dari pertumbuhan anggaran)

Diagnosa: Ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi belanja pegawai, dengan kecenderungan over-budgeting yang semakin besar.

2. Belanja Barang dan Jasa

- **Anggaran:** Fluktuatif dengan puncak di 2022 (Rp2.57 miliar) dan terendah 2023 (Rp2.11 miliar).
- **Realisasi:** Konsisten di bawah anggaran tetapi pola fluktuasi mengikuti anggaran.
- **Rasio Realisasi/Anggaran:** Relatif stabil di kisaran 88-93% (kecuali 2020: 88.8%).
- **Pertumbuhan:**
 - Rata-rata pertumbuhan anggaran: Rp153 juta/tahun
 - Rata-rata pertumbuhan realisasi: Rp153.8 juta/tahun

Diagnosa: Perencanaan dan realisasi cukup seimbang dengan rasio konsisten, menunjukkan kemampuan prediksi yang baik.

3. Belanja Modal

- **Anggaran:** Sangat fluktuatif dengan penurunan drastis di 2022 (Rp34.5 juta) dari Rp213.3 juta (2021).
- **Realisasi:** Mengikuti pola anggaran tetapi selalu di bawah target.
- **Rasio Realisasi/Anggaran:** Variatif dari 85.3% (2023) hingga 96% (2020).
- **Pertumbuhan:**
 - Rata-rata pertumbuhan anggaran: **negatif** Rp23.9 juta/tahun
 - Rata-rata pertumbuhan realisasi: **negatif** Rp24.1 juta/tahun

Diagnosa: Ada ketidakstabilan dalam perencanaan belanja modal dengan tren penurunan anggaran dan realisasi.

Rekomendasi:

1. **Belanja Pegawai:** Perlu evaluasi metode perencanaan untuk mengurangi gap antara anggaran dan realisasi.
2. **Belanja Barang/Jasa:** Pertahankan model perencanaan yang sudah baik.
3. **Belanja Modal:** Perlukan konsistensi dalam perencanaan dan evaluasi kebutuhan riil investasi modal.
4. **Umum:** Perlu analisis lebih mendalam terhadap faktor penyebab ketidaksesuaian, terutama untuk belanja pegawai dan modal.

Analisis Deskriptif Anggaran dan Realisasi Baperida Kabupaten Pesisir Selatan (2020-2024)

1. Belanja Pegawai

- **Anggaran:**
 - 2020: Rp3.558 miliar → 2024: Rp4.411 miliar (kenaikan 24%)
 - Rata-rata pertumbuhan anggaran: Rp213.2 juta/tahun
- **Realisasi:**
 - 2020: Rp3.416 miliar → 2024: Rp3.685 miliar (kenaikan 8%)
 - Rata-rata pertumbuhan realisasi: Rp67.1 juta/tahun

- **Rasio Realisasi/Anggaran:**
 - Terendah: 84.3% (2020), Tertinggi: 97.3% (2022)
 - Tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun di tahun 2024 (83.5%)

2. Belanja Barang dan Jasa

- **Anggaran:**
 - 2020: Rp2.092 miliar → 2024: Rp2.704 miliar (kenaikan 29%)
 - Rata-rata pertumbuhan: Rp153 juta/tahun
- **Realisasi:**
 - 2020: Rp1.857 miliar → 2024: Rp2.472 miliar (kenaikan 33%)
 - Rata-rata pertumbuhan: Rp153.8 juta/tahun (hampir sama dengan anggaran)
- **Rasio Realisasi/Anggaran:**
 - Konsisten di kisaran 88-93% setiap tahun
 - Pencapaian terbaik di tahun 2022 (93.1%)

3. Belanja Modal

- **Anggaran:**
 - Fluktuatif: Rp162 juta (2020) → Rp66.5 juta (2024) (penurunan 59%)
 - Rata-rata pertumbuhan negatif: -Rp23.9 juta/tahun
- **Realisasi:**
 - Rp155.6 juta (2020) → Rp59.2 juta (2024) (penurunan 62%)
 - Rata-rata pertumbuhan negatif: -Rp24.1 juta/tahun
- **Rasio Realisasi/Anggaran:**
 - Pencapaian sangat baik (96-98%) kecuali tahun 2023 (95.3%)

Tren Keseluruhan:

1. **Belanja Pegawai:** Dominan dalam struktur anggaran (>50% total), realisasi lebih rendah dari anggaran dengan gap yang melebar di tahun 2024.

2. **Belanja Barang/Jasa:** Pertumbuhan seimbang antara anggaran dan realisasi, dengan pencapaian konsisten mendekati 90%.
3. **Belanja Modal:** Alokasi terus menurun baik anggaran maupun realisasi, meski realisasi hampir selalu >95% dari anggaran.

Rekomendasi:

1. Evaluasi penyebab rendahnya realisasi belanja pegawai terutama di tahun 2024.
2. Pertahankan kinerja belanja barang/jasa yang sudah optimal.
3. Tinjau kembali strategi penganggaran belanja modal yang terus menurun.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kelompok sasaran layanan yaitu perangkat daerah, kecamatan, dan nagari yang membutuhkan pelayanan konsultasi penyusunan dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan penelitian. Pelayanan konsultasi ini dapat dilakukan melalui pengampu masing-masing perangkat daerah yang ada di Baperida.

Konsultasi dapat dilakukan kapan saja terutama pada saat penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah dan Kecamatan, penginputan DURKP bagi nagari, dan penginputan pada SIPD RI.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi, memberikan pelayanan kepada perangkat daerah, kecamatan, dan nagari. Dalam memberikan pelayanan kepada perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki permasalahan sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah sumber daya perencana dan peneliti sehingga tugas yang dilaksanakan berjalan kurang optimal.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dalam melaksanakan proses perencanaan daerah.
3. Belum akuratnya data-data yang dibutuhkan dalam mendukung perencanaan.
4. Masih terpusatnya sistem aplikasi perencanaan daerah sehingga jika ada gangguan sistem dari pusat, maka terganggu proses perencanaan di daerah.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam perencanaan dan penelitian.
6. Masih terkendalanya penjadwalan dalam tahapan-tahapan perencanaan.

2.2.2 Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau keadaan yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan perangkat daerah. Isu strategis dapat berdampak signifikan bagi perangkat daerah. Karakteristik isu strategis adalah penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan perangkat daerah.

Berikut isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah:

1. Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Penguatan basis data dengan sistem informasi terpadu.
3. Peningkatan kolaborasi antar-OPD, akademisi, dan masyarakat.
4. Pengalokasian anggaran khusus untuk litbang berbasis kebutuhan daerah.
5. Pembuatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil penelitian.
6. Perkuatan SDM melalui pelatihan dan rekrutmen ahli.

Uraian tentang permasalahan dan isu strategis terlihat pada table 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Perumusan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perencanaan yang Konsisten	Implementasi dan Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan belum maksimal	Integrasi KLHS dalam Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Transformasi Digital dan Teknologi	Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas	Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Adanya Kajian dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan	Ketersediaan data yang tidak lengkap atau tidak terupdate menghambat penyusunan perencanaan yang berbasis evidence-based.			Peningkatan Kualitas SDM Perencanaan	Sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif	Penguatan basis data dengan sistem informasi terpadu.

	Sinkronisasi antara Bappelitbang dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain sering tidak optimal, menyebabkan rencana tidak terintegrasi.			Transformasi Tata Kelola : Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.	Optimalisasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan kolaborasi antar-OPD, akademisi, dan masyarakat.
	Minimnya keterlibatan masyarakat dan stakeholders dalam penyusunan perencanaan, sehingga rencana kurang sesuai dengan kebutuhan riil.				kualitas pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan	Pengalokasian anggaran khusus untuk litbang berbasis kebutuhan daerah.
	Dana penelitian terbatas, sehingga banyak kajian penting tidak terlaksana.					Perkuatan SDM melalui pelatihan dan rekrutmen ahli.
	Kurangnya peneliti kompeten atau tenaga ahli di daerah, menyebabkan kualitas penelitian rendah.					Pembuatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil penelitian.

	Banyak rekomendasi penelitian hanya menjadi arsip tanpa ditindaklanjuti menjadi kebijakan.					
	Penggunaan metode penelitian yang lemah, sehingga hasilnya kurang valid untuk pengambilan keputusan.					

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 yang menjadi Tugas dan Fungsi dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan berisi pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yaitu **"Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan"** dengan 5 (lima) misi, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui misi ke-1 yaitu **"Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas"** dengan tujuan **"Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi"** dan Sasaran Strategis Pemda **"1.1.3: Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi"** dan Sasaran **"1.1.2: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing"**, merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2029.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan Sasaran RPJMD 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut dirancang untuk meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang akuntabel, berbasis riset dan inovasi, serta mendukung pembangunan daerah yang berdaya saing.

3.1.1 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas berbasis riset dan inovasi. Tujuan ini memiliki Indikator kinerja “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah” dengan target Peningkatan bertahap dari 60 pada tahun 2025 hingga 80 pada tahun 2030. Tujuan ini mendorong penggunaan riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi alat ukur kualitas perencanaan, dengan target peningkatan yang mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan daya saing

3.1.2 Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2025-2029.

Tujuan yang disajikan pada nomor 3.1.1 didukung oleh Sasaran Strategis sebagai berikut:

3.1.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja memiliki indikator kinerja yaitu 1. Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja dengan target (dari 24,42 pada tahun 2025 menjadi 25,40 pada tahun 2030), 2. Nilai SAKIP pada komponen Pengukuran Kinerja dengan target (dari 18,33 pada tahun 2025 menjadi 20 pada tahun 20230).

Nilai SAKIP pada komponen perencanaan maupun pengukuran kinerja mencerminkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi. Target yang meningkat menunjukkan upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam perencanaan dan evaluasi kinerja.

3.1.2.2 Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Sasaran Strategis Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Kebijakan Berbasis Bukti dengan target 70% (2025) menjadi 87% (2030). Sasaran ini menekankan pentingnya evidence-based policy dalam pembangunan. Target persentase yang meningkat menunjukkan integrasi riset dan inovasi ke dalam proses pengambilan kebijakan.

3.1.2.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah memiliki indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Bapedalitbang dengan target mempertahankan prediket “AA” dengan nilai stabil di atas 90. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang konsisten mencerminkan transparansi dan efektivitas kinerja institusi. Predikat "AA" menunjukkan standar kinerja tinggi yang berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran beserta indikator dan target terlihat pada tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Berkualitas yang Berbasis Riset dan Inovasi		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	-	-	75	80	85	90	95	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja (Angka)	24,19	24,42	24,6	24,8	25	25,2	25,4	
			Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja (Angka)	18,05	18,33	18,53	18,73	18,93	19,13	20	
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (%)	-	-	70	72	75	83	85	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	90,43	90,45	90,47	90,5	90,52	90,55	90,57		

Agar seluruh stakeholder Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) adalah suatu ukuran komposit yang menilai kualitas perencanaan pembangunan daerah berdasarkan aspek kesesuaian, konsistensi, partisipasi publik, dan implementasi dokumen perencanaan (seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra SKPD). Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana proses perencanaan daerah telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pembangunan yang baik.
Formulasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian dengan Nasional & Daerah (30%)<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian RPJMD/RKPD dengan Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN) dan kebutuhan daerah.2. Konsistensi Antar Dokumen (25%)<ul style="list-style-type: none">- Keterkaitan antara RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan dokumen teknis lainnya.3. Partisipasi Publik (20%)<ul style="list-style-type: none">- Tingkat keterlibatan Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan.4. Kualitas Monitoring & Evaluasi (15%)<ul style="list-style-type: none">- Sistem evaluasi dan revisi dokumen perencanaan berdasarkan capaian kinerja

5. Dukungan Data & Inovasi (10%)

- Penggunaan data actual dan metode inovatif dalam perencanaan.

Sumber data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Permenpan RB
Penanggung jawab	:	Baperida (terkait komponen Perencanaan Kinerja) dan Seluruh OPD

2. Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan Kinerja

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Sakip pada komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Yang dituntut dalam komponen Perencanaan kinerja adalah kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
Formulasi	:	Hasil Evaluasi Kemenpan RB
Sumber data	:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Permenpan RB
Penanggung jawab	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (terkait komponen Pengukuran Kinerja) dan seluruh OPD

3. Nilai Sakip Pada Komponen Pengukuran Kinerja

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Sakip pada komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah yang dibagi atas tiga sub komponen yaitu

Keberadaan, Kualitas dan Keberadaan sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB 88 tahun 2021. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

Formulasi : Hasil Evaluasi Kemenpan RB
Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Permenpan RB
Penanggung jawab : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (terkait komponen Pengukuran Kinerja) dan seluruh OPD

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapedalitbang.

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi : Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

5. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Persentase kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) adalah proporsi kebijakan daerah yang dirumuskan atau dievaluasi berdasarkan hasil riset, data empiris, atau rekomendasi ilmiah, dibandingkan dengan total kebijakan yang dikeluarkan dalam periode tertentu.

Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan riset dan inovasi sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.

Komponen Pengukuran:

1. Kebijakan Berbasis Bukti (KB):

Kebijakan yang memenuhi kriteria berikut:

- Didukung oleh hasil riset/penelitian (misalnya kajian akademis, laporan lembaga riset, atau data statistik).
- Memuat analisis berbasis data (e.g., survei, pemodelan, atau evaluasi program sebelumnya).
- Melibatkan rekomendasi dari pakar atau lembaga independen.

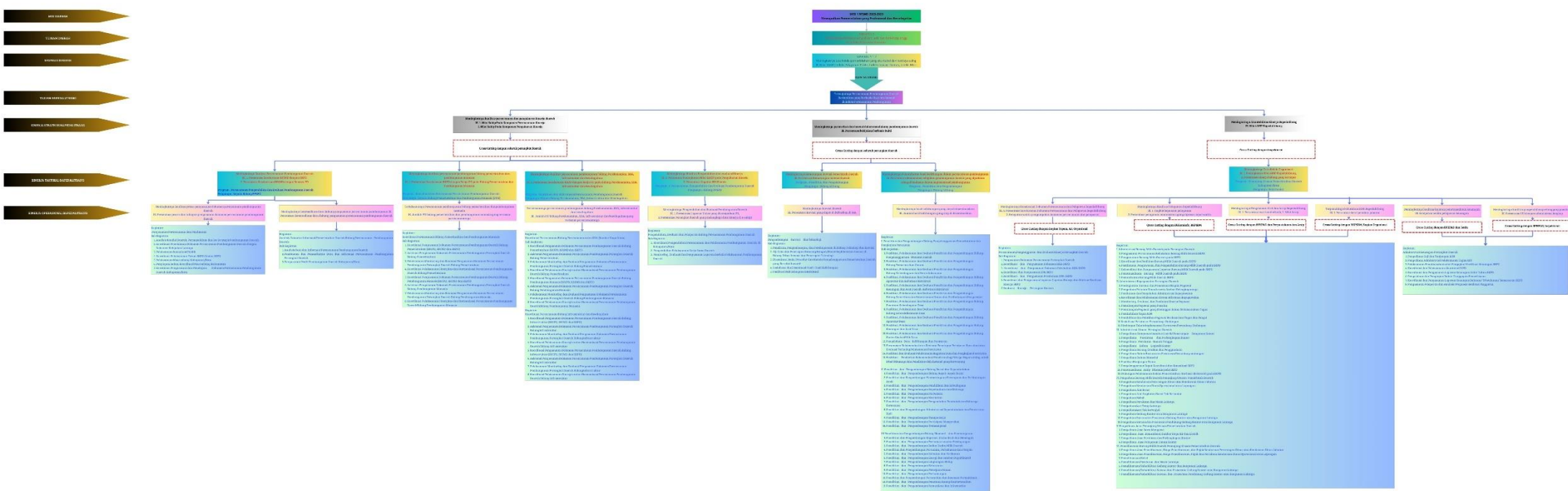
2. Total Kebijakan yang Dikeluarkan (TK):

Seluruh produk kebijakan daerah (Perda, Perbup/Perwali, SK, atau rencana aksi) dalam periode tertentu (misalnya 1 tahun).

Formulasi	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti (KB)</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">x 100</td> </tr> <tr> <td>Total Kebijakan Dikeluarkan (TK)</td> <td></td> </tr> </table>	Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti (KB)			x 100	Total Kebijakan Dikeluarkan (TK)	
Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti (KB)								
	x 100							
Total Kebijakan Dikeluarkan (TK)								
Sumber data	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen kebijakan resmi (lampiran kajian, naskah akademik, atau notulen diskusi dengan peneliti). - Database riset daerah (misalnya dari Bapedalitbang atau perguruan tinggi). 						
Penanggung jawab	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						

Secara garis besar, keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan Tujuan dan Sasaran Baperida Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi Baperida sebagai unsur penunjang dalam Urusan Perencanaan dapat digambarkan dalam bentuk cascading/pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 3.1
Cascading



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025-2029

Renstra Baperida Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam mengoptimalkan peran perencanaan, penelitian, dan pengembangan serta riset dan inovasi untuk mendukung tercapainya target pembangunan daerah. Dokumen ini memuat strategi yang berorientasi pada kebijakan berbasis data, inovasi lokal, serta sinergi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan “**Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan**”. Berikut Pentahapan Renstra Baperida tahun 2025-2029.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Baperida Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kolaborasi antar PD, akademisi, dan partisipasi publik dalam pembangunan dengan membangun forum kolaborasi antara pemerintah daerah (PD), akademisi, dan masyarakat serta melakukan sosialisasi awal untuk meningkatkan partisipasi publik.	Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan menyelaraskan rencana pembangunan antar sektor dan daerah dan menyusun mekanisme koordinasi rutin antar-PD.	Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengembangan Kebijakan dengan melibatkan swasta dan NGO dalam penyusunan kebijakan dan mengadakan lokakarya untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan secara Berkala melalui evaluasi menyeluruh terhadap semua kebijakan yang telah diimplementasikan serta penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.	Konsolidasi akhir dan penyiapan rencana berikutnya dengan memastikan semua strategi telah terimplementasi dengan baik dan menyusun kerangka kerja untuk periode renstra berikutnya dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi.
Peningkatan kapasitas perencana daerah melalui Pelatihan dasar bagi perencana daerah tentang metode perencanaan modern dan Penyusunan panduan perencanaan pembangunan daerah	Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi (monev) sederhana dan melakukan evaluasi awal terhadap rencana yang disusun.	Pemanfaatan Teknologi dan Data untuk Pengambilan Kebijakan dengan mengimplementasikan sistem berbasis teknologi (e.g., big data, AI) untuk analisis kebijakan dan Melakukan uji coba penggunaan data real-time dalam perencanaan.	Revisi dan Penyempurnaan Strategi dengan menyesuaikan strategi berdasarkan temuan evaluasi dan memperbarui panduan dan metode perencanaan.	

<p>Optimalisasi Perencanaan Berbasis Data dengan Identifikasi sumber data dan kebutuhan teknologi untuk perencanaan serta pelatihan awal dalam analisis data untuk perencana</p>	<p>Penguatan Kapasitas Riset dan Inovasi dengan membangun kemitraan dengan perguruan tinggi untuk riset terapan dan mengadakan pelatihan riset bagi staf Bapedalitbang.</p>	<p>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Berbasis Bukti dengan Kampanye publik tentang kebijakan yang telah dihasilkan Penyebaran hasil riset kepada pemangku kepentingan</p>		
--	---	--	--	--

3.2.2 Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Baperida dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapedalitbang tahun 2025-2029. Rumusan arah kebijakan Renstra Baperida disajikan dalam tabel berikut.

No	Operasionalisasi NSK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bapedalitbang	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi</p>	<p>Meningkatkan kualitas SDM Perencana melalui pelatihan teknis dan magang. Mengembangkan profesionalisme perencana melalui penulisan dan publikasi policy paper dan policy brief terkait perencanaan pembangunan daerah dan dinamikanya. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang riset dan inovasi melalui pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian. Membentuk forum atau platform kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti. Mendorong kemitraan dengan universitas, lembaga riset, dan</p>	

	organisasi non-pemerintah dalam penyusunan kajian kebijakan
Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat	Mendorong keterlibatan aktif akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan.
	Meningkatkan transparansi informasi pembangunan melalui berbagai media
Memperkuat kapasitas institusi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan	Integrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Berbasis SAKIP
	Mengoptimalkan penerapan satu data Indonesia berbasis digitalisasi.
	Menyediakan sumber data yang mudah diakses, valid, berbasis evidence, interoperabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
	Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.
	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja melalui sistem informasi yang terintegrasi.
	Mengembangkan E-Sakip dalam pelaksanaan pengukuran kinerja.
	Meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan dan penyusunan kebijakan perencanaan tahun berikutnya.
	Penerapan Manajemen Risiko dalam penyusunan perencanaan sebagai upaya awal terhadap kemungkinan munculnya penghambat tercapainya target pembangunan daerah
	Menyediakan fasilitas dan pendanaan yang memadai untuk kegiatan riset, termasuk hibah penelitian berbasis kebutuhan daerah.
	Membangun pusat data terintegrasi yang menyediakan akses terbuka bagi peneliti dan pemangku kebijakan.

		<p>Menerapkan mekanisme “peer review” dan uji coba (pilot project) sebelum kebijakan diimplementasikan secara luas.</p> <p>Melakukan diseminasi hasil riset melalui seminar, policy brief, dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan.</p> <p>Membuat mekanisme umpan balik (feedback mechanism) antara peneliti dan pembuat kebijakan untuk memastikan rekomendasi riset dipertimbangkan.</p> <p>Menetapkan indikator kinerja yang terukur untuk menilai efektivitas kebijakan berbasis riset.</p> <p>Melakukan audit kebijakan secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan temuan riset terbaru</p> <p>Membentuk tim evaluasi independen yang terdiri dari pakar dan masyarakat untuk menilai dampak kebijakan.</p>
	<p>Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE;</p>	<p>Mengembangkan sistem informasi berbasis data (evidence-based policy dashboard) untuk memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan.</p> <p>Menerapkan analisis big data dan “artificial intelligence” (AI) dalam mengidentifikasi masalah dan solusi pembangunan daerah.</p> <p>Memastikan ketersediaan data terbuka (open data) yang akurat dan terupdate untuk mendukung riset kebijakan.</p>

Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2025-2029

MISI KE-1 RPJMD KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029 : Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas			
TUJUAN RPJMD KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029 : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif			
SASARAN RPJMD KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing			
Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan :			
Tujuan dan Indikator	Sasaran dan Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
<p>Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Berkualitas yang Berbasis Riset dan Inovasi</p> <p>Indikator Tujuan : Indeks Perencanaan Pembangunan</p>	<p>Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah</p> <p>Indikator Sasaran : 1. Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan Kinerja 2. Nilai Sakip Pada Komponen Pengukuran Kinerja</p>	<p>Penguatan kolaborasi antar PD, Akademisi dan partisipasi publik dalam pembangunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong keterlibatan aktif akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi perencanaan pembangunan. 2. Integrasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Berbasis SAKIP 3. Meningkatkan transparansi informasi pembangunan melalui berbagai media.

		Peningkatan kapasitas perencana daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM Perencana melalui pelatihan teknis dan magang. 2. Mengembangkan profesionalisme perencana melalui penulisan dan publikasi policy paper dan policy brieft terkait perencanaan pembangunan daerah dan dinamikanya.
		Optimalisasi Perencanaan Berbasis Data (Strength-Opportunity)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penerapan satu data Indonesia berbasis digitalisasi. 2. Menyediakan sumber data yang mudah diakses, valid, berbasis evidence, interoperabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
		Meningkatkan Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. 2. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor
		Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja melalui sistem informasi yang terintegrasi.

		Pembangunan Daerah	<p>2. Mengembangkan E-Sakip dalam pelaksanaan pengukuran kinerja.</p> <p>3. Meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan dan penyusunan kebijakan perencanaan tahun berikutnya.</p> <p>4. Penerapan Manajemen Risiko dalam penyusunan perencanaan sebagai upaya awal terhadap kemungkinan munculnya penghambat tercapainya target pembangunan daerah</p>
	<p>Sasaran 1.2: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah</p> <p>Indikator Sasaran: Persentase Kebijakan Berbasis Bukti</p>	Penguatan Kapasitas Riset dan Inovasi	<p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang riset dan inovasi melalui pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian.</p> <p>2. Menyediakan fasilitas dan pendanaan yang memadai untuk kegiatan riset, termasuk hibah penelitian berbasis kebutuhan daerah.</p> <p>3. Membangun pusat data terintegrasi yang menyediakan akses</p>

			terbuka bagi peneliti dan pemangku kebijakan.
		Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengembangan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk forum atau platform kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti. 2. Mendorong kemitraan dengan universitas, lembaga riset, dan organisasi non-pemerintah dalam penyusunan kajian kebijakan. 3. Menerapkan mekanisme “peer review” dan uji coba (pilot project) sebelum kebijakan diimplementasikan secara luas.
		Pemanfaatan Teknologi dan Data untuk Pengambilan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem informasi berbasis data (evidence-based policy dashboard) untuk memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan. 2. Menerapkan analisis big data dan “artificial intelligence” (AI) dalam mengidentifikasi masalah dan solusi pembangunan daerah. 3. Memastikan ketersediaan data terbuka (open data)

			yang akurat dan terupdate untuk mendukung riset kebijakan.
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Berbasis Bukti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan diseminasi hasil riset melalui seminar, policy brief, dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan. 2. Membuat mekanisme umpan balik (feedback mechanism) antara peneliti dan pembuat kebijakan untuk memastikan rekomendasi riset dipertimbangkan.
		Monitoring dan Evaluasi Kebijakan secara Berkala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan indikator kinerja yang terukur untuk menilai efektivitas kebijakan berbasis riset. 2. Melakukan audit kebijakan secara rutin untuk memastikan kesesuaian dengan temuan riset terbaru. 3. Membentuk tim evaluasi independen yang terdiri dari pakar dan masyarakat untuk menilai dampak kebijakan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

4.1 . PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah, Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan memerlukan instrumen berupa rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan strategi, arah kebijakan, serta tugas dan fungsi. Penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, dalam konteks urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah terdapat dua program perencanaan, dua program penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi ditambah satu program penunjang urusan pemerintahan yang menjadi gambaran utama dari rencana program Bapperida ke depan, yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

TABEL 4.1

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Berkualitas yang Berbasis Riset dan Inovasi	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
					Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja (Angka)		
					Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja (Angka)		
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						
Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						

			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

		bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		dan Pembangunan Manusia (Persentase)		
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

				Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja		Persentase peningkatan nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	

				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPJMD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (%)		
Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	5.05.02.2.01.0014 - Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
		Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
	Meningkatnya pemanfaatan inovasi		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

		daerah dalam pembangunan	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		
				Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset		
			Terlaksananya Inovasi dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi		
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi		
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah		
				Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi		Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Kinerja Bidang yang tercapai (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					

				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		

				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan arah pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan berkesinambungan. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat perencanaan dan inovasi, Renstra ini memuat berbagai program yang mencakup peningkatan tata kelola organisasi, penguatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, koordinasi lintas sektor, serta pengembangan riset dan inovasi daerah. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja, target, serta pagu indikatif tahunan yang menjadi dasar pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan.

Program-program tersebut meliputi:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Berfokus pada peningkatan tata kelola organisasi dan penguatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Program ini diharapkan mendorong tercapainya kinerja perangkat daerah secara konsisten.
- 2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
Ditujukan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta memperkuat sistem pengukuran kinerja melalui SAKIP.
- 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
Memastikan keterpaduan antara dokumen perencanaan lintas sektor, baik di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan, maupun perekonomian dan sumber daya alam.
- 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**
Difokuskan pada peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan.
- 5. Program Riset dan Inovasi Daerah**
Mendorong terciptanya dan termanfaatkannya produk-produk inovasi daerah yang berdaya guna bagi pembangunan, sehingga memperkuat daya saing dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dengan adanya kerangka program ini, diharapkan arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi, adaptif terhadap tantangan, serta mampu mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan. Secara detail, program tersebut terdapat pada tabel 4.2 berikut:

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				8.369.600.000		8.431.000.000		8.774.500.000		8.910.000.000		9.317.000.000		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.193.600.000		7.221.000.000		7.442.000.000		7.534.000.000		7.740.000.000		
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Persentase Kinerja Bidang yang tercapai (%)	100	91-100	7.193.600.000	91-100	7.221.000.000	91-100	7.442.000.000	91-100	7.534.000.000	91-100	7.740.000.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	-0,03	0,02		0,03		0,02		0,03		0,02			
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95.000.000		95.000.000		95.000.000		110.000.000		115.000.000		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22	22	95.000.000	22	95.000.000	22	95.000.000	22	110.000.000	22	115.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7		7		7		7		7			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	60.000.000	7	60.000.000		

5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.000.000		45.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	22	22	45.000.000	22	45.000.000	22	45.000.000	22	50.000.000	22	55.000.000		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.615.000.000		5.625.000.000		5.830.000.000		5.835.000.000		5.935.000.000		
Tertindakannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	504	518	5.615.000.000	504	5.625.000.000	504	5.830.000.000	504	5.835.000.000	504	5.935.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.500.000.000		5.500.000.000		5.700.000.000		5.700.000.000		5.800.000.000		
Tertindakannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	504	518	5.500.000.000	504	5.500.000.000	504	5.700.000.000	504	5.700.000.000	504	5.800.000.000		
5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				115.000.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000		135.000.000		
Tertindakannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	115.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000		
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tertindakannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Tertindakannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				95.000.000		95.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	6	95.000.000	6	95.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000		
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				95.000.000		95.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	6	95.000.000	6	95.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				561.600.000		593.000.000		607.000.000		625.000.000		655.000.000		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	561.600.000	1	593.000.000	1	607.000.000	1	625.000.000	1	655.000.000		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			

5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				33.000.000		33.000.000		35.000.000		35.000.000		37.000.000		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	33.000.000	1	33.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	37.000.000		
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000		30.000.000		32.000.000		33.000.000		35.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000	1	35.000.000		
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		37.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	37.000.000		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.000.000		37.000.000		38.000.000		39.000.000		40.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	37.000.000	1	37.000.000	1	38.000.000	1	39.000.000	1	40.000.000		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.000.000		30.000.000		32.000.000		33.000.000		35.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000	1	35.000.000		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				8.600.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		14.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36	8.600.000	36	10.000.000	36	10.000.000	36	10.000.000	36	14.000.000		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				23.000.000		23.000.000		25.000.000		25.000.000		27.000.000		
Tertaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	23.000.000	12	23.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	27.000.000		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000		375.000.000		375.000.000		385.000.000		400.000.000		

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	350.000.000	12	375.000.000	12	375.000.000	12	385.000.000	12	400.000.000		
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.000.000		60.000.000		45.000.000		65.000.000		120.000.000		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	4	100.000.000	4	60.000.000	2	45.000.000	2	65.000.000	4	120.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10		10		6		15		5			
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				40.000.000		40.000.000		30.000.000		45.000.000		40.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	40.000.000	10	40.000.000	6	30.000.000	15	45.000.000	5	40.000.000		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		20.000.000		15.000.000		20.000.000		80.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	4	60.000.000	4	20.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	4	80.000.000		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				440.000.000		460.000.000		460.000.000		480.000.000		490.000.000		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	440.000.000	12	460.000.000	12	460.000.000	12	480.000.000	12	490.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100.000.000		120.000.000		120.000.000		130.000.000		135.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	100.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	12	135.000.000		

5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				340.000.000		340.000.000		340.000.000		350.000.000		355.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	340.000.000	12	340.000.000	12	340.000.000	12	350.000.000	12	355.000.000		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				267.000.000		273.000.000		280.000.000		294.000.000		300.000.000		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	34	34	267.000.000	34	273.000.000	34	280.000.000	34	294.000.000	34	300.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	3		5		5		4		4			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000		82.000.000		83.000.000		84.000.000		85.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	80.000.000	1	82.000.000	1	83.000.000	1	84.000.000	1	85.000.000		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				92.000.000		92.000.000		94.000.000		95.000.000		95.000.000		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	8	92.000.000	8	92.000.000	8	94.000.000	8	95.000.000	8	95.000.000		
5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				22.000.000		21.000.000		23.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	3	22.000.000	5	21.000.000	5	23.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				23.000.000		23.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	34	34	23.000.000	34	23.000.000	34	25.000.000	34	30.000.000	34	30.000.000		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		55.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	50.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				590.000.000		590.000.000		667.500.000		630.000.000		765.000.000		
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	Persentase peningkatan nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja (%)	0,38	1,09	40.000.000	1,07	40.000.000	1,06	112.500.000	1,05	45.000.000	4,54	45.000.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				40.000.000		40.000.000		112.500.000		45.000.000		45.000.000		
Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4	40.000.000	4	40.000.000	4	112.500.000	4	45.000.000	4	45.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	1	1		1		1		1		1		
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				7.500.000		7.500.000		75.000.000		7.500.000		7.500.000	
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4	4	7.500.000	4	7.500.000	4	75.000.000	4	7.500.000	4	7.500.000	
5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000	
Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	1	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	550.000.000	100	550.000.000	100	555.000.000	100	585.000.000	100	720.000.000	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				490.000.000		490.000.000		495.000.000		515.000.000		650.000.000	
Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	2	490.000.000	2	490.000.000	2	495.000.000	2	515.000.000	3	650.000.000	

	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1		1		1		1		2		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1		1		1		1		2		
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	1		1		1		1		2		
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	15	15		15		15		15		15		
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	2	20.000.000	
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	2	5.000.000	

5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		55.000.000		55.000.000		60.000.000		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	2	60.000.000		
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	15	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				380.000.000		380.000.000		380.000.000		400.000.000		530.000.000		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	2	380.000.000	2	380.000.000	2	380.000.000	2	400.000.000	3	530.000.000		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				60.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	40	40	60.000.000	40	60.000.000	40	60.000.000	40	70.000.000	40	70.000.000		
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	40	40		40		40		40		40			

	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)													
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	40	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	35.000.000	40	35.000.000		
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	40	40	30.000.000	40	30.000.000	40	30.000.000	40	35.000.000	40	35.000.000		
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)			0		0		0		0		0		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				586.000.000		620.000.000		665.000.000		746.000.000		812.000.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Persentase)	100	100	260.000.000	100	274.000.000	100	283.000.000	100	302.000.000	100	337.000.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				260.000.000		274.000.000		283.000.000		302.000.000		337.000.000		

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4	260.000.000	4	274.000.000	4	283.000.000	4	302.000.000	4	337.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			

5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	8	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000		
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5.000.000		6.000.000		7.000.000		10.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	5.000.000	4	6.000.000	4	7.000.000	4	10.000.000	4	12.000.000		
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				18.000.000		18.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	18.000.000	4	18.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				42.000.000		45.000.000		45.000.000		47.000.000		50.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	42.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	47.000.000	4	50.000.000		

5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000		
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				10.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4	10.000.000	4	15.000.000	4	18.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				10.000.000		15.000.000		18.000.000		20.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4	10.000.000	4	15.000.000	4	18.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000		
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		30.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	30.000.000		

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	191.000.000	100	191.000.000	100	197.000.000	100	229.000.000	100	235.000.000		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				191.000.000		191.000.000		197.000.000		229.000.000		235.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	2	191.000.000	2	191.000.000	2	197.000.000	2	229.000.000	2	235.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	14	14		14		14		14		14			

	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	14	14		14		14		14		14			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				26.000.000		26.000.000		28.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	26.000.000	2	26.000.000	2	28.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				20.000.000		20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		

5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				25.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				20.000.000		20.000.000		24.000.000		24.000.000		25.000.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	14	14	20.000.000	14	20.000.000	14	24.000.000	14	24.000.000	14	25.000.000		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		15.000.000		
Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	14	14	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	15.000.000		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	14	14	15.000.000	14	15.000.000	14	15.000.000	14	20.000.000	14	20.000.000		

5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				60.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	135.000.000	100	155.000.000	100	185.000.000	100	215.000.000	100	240.000.000		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				135.000.000		155.000.000		185.000.000		215.000.000		240.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4	135.000.000	4	155.000.000	4	185.000.000	4	215.000.000	4	240.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				10.000.000		15.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4	10.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				15.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4	15.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				20.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	35.000.000		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				10.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4	10.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				20.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	4	4	20.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				910.000.000		920.000.000		980.000.000		1.000.000.000		1.110.000.000		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				760.000.000		770.000.000		820.000.000		840.000.000		910.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0	50	760.000.000	60	770.000.000	70	820.000.000	80	840.000.000	90	910.000.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				600.000.000		600.000.000		650.000.000		650.000.000		700.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	8	4	600.000.000	4	600.000.000	4	650.000.000	4	650.000.000	4	700.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)		1		1		1		1		1			
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				550.000.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000		650.000.000		

Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	8	4	550.000.000	4	550.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	650.000.000		
5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				160.000.000		170.000.000		170.000.000		190.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	2	2	160.000.000	2	170.000.000	2	170.000.000	2	190.000.000	2	210.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	4		4		4		4		4			
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				120.000.000		130.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	2	2	120.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	2	140.000.000	2	150.000.000		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				40.000.000		40.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	50.000.000	4	60.000.000		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				150.000.000		150.000.000		160.000.000		160.000.000		200.000.000		

Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	50	150.000.000	55	150.000.000	60	160.000.000	65	160.000.000	70	200.000.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				70.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	4	70.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	120.000.000		
5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset				70.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		120.000.000		
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	4	70.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	4	120.000.000		
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Inovasi dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tahun 2025–2029 disusun dengan menyesuaikan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah terhadap arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Sinkronisasi ini dilakukan agar setiap langkah perencanaan, pengendalian, serta pengembangan riset dan inovasi benar-benar mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Program **Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah** dalam Renstra berkontribusi terhadap sasaran RPJMD berupa meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan analisis kondisi daerah, koordinasi penelaahan dokumen, musrenbang, hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** mendukung sasaran RPJMD terkait konsistensi pembangunan lintas bidang. Program ini memastikan sinkronisasi perencanaan pembangunan manusia, perekonomian, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan dengan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Sementara itu, **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** serta **Program Riset dan Inovasi Daerah** diarahkan untuk mendukung sasaran RPJMD yang berfokus pada penguatan daya saing daerah, pemanfaatan hasil riset, serta penciptaan inovasi daerah yang dapat diimplementasikan dalam pembangunan. Kedua program ini menjadi penggerak agar pembangunan berbasis data, hasil kajian, serta inovasi dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, seluruh program prioritas Renstra telah diselaraskan dengan Program Prioritas RPJMD, sehingga fungsi Bappeda Litbang tidak hanya sebagai perencana, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi dan pengendali arah pembangunan daerah.

Berikut adalah daftar Sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah pada tabel 4.3.

TABEL 4.3

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	

PEMBANGUNAN DAERAH			5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				
			5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				
			5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				
			5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				
			5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
			5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
			5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				
			Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
				5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
				5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah			
				5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
			2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan							
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							

		5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
		5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
		5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
		5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
		5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
		5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
		5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
		5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
		5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

			5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
3.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
			5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
4.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
			5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	

TABEL 4.4
MATRIK KESELARASAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD DAN RENSTRA BAPPERIDA

No	Sasaran	Program Prioritas RPJMD	Outcome RPJMD	Program Prioritas Renstra	Outcome Renstra	Indikator Renstra
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas perencanaan meningkat	Dokumen perencanaan konsisten
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi perencanaan meningkat	Dokumen lintas sektor harmonis
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Penelitian dan pengembangan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Hasil kelitbangan dimanfaatkan	Jumlah hasil riset yang digunakan
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Riset dan inovasi daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Program Riset dan Inovasi Daerah	Inovasi dimanfaatkan dalam pembangunan	Jumlah inovasi diterapkan

4.1.1. PROGRAM PRO RAKYAT (PROGRAM UNGGULAN BUPATI-WAKIL BUPATI TERPILIH PERIODE 2025-2029)

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai Perangkat Daerah pendukung mengampu Program Pro Rakyat sesuai dengan Misi yang diampu pada Tujuan I dan Sasaran kedua di mana Misi 1 sebagai fondasi pencapaian visi dan misi yang merupakan misi fundamental yang menjadi landasan bagi tercapainya seluruh visi misi. Tidak hanya berperan sebagai penopang administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan yang berpihak pada rakyat. Seluruh program di Bapperida yaitu:

1. Program Penunjang urusan pemerintahan
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan
5. Program Riset dan Inovasi

Keterkaitan Program Pro Rakyat dengan Program kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terlihat pada Tabel 4.5 berikut.

TABEL 4.5

MATRIK KESELARASAN PROGRAM PRO RAKYAT RPJMD DAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM PRO RAKYAT	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)		(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					
1.	Misi 1 sebagai fondasi pencapaian visi dan misi yang merupakan misi fundamental yang menjadi landasan bagi tercapainya seluruh visi misi. Tidak hanya berperan sebagai penopang administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan yang berpihak pada rakyat	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik 5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	

			5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	

		5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
		5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
		5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
		5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
		5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
		5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	

			5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
3.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
			5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	

			5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
4.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
			5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	

Peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam Mendukung Program Pro-Rakyat

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) berperan memfasilitasi penyusunan perencanaan yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis data. Melalui koordinasi dengan seluruh OPD dan pemangku kepentingan, Bapperida memastikan bahwa program pro-rakyat (seperti NAGARI SEHAT, NAGARI PANDAI, dll.) dirancang sesuai kebutuhan riil masyarakat dan didukung oleh kebijakan yang tepat.

Bapperida menjadi tulang punggung perencanaan pembangunan dengan menyusun dokumen seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra yang menjadi acuan pelaksanaan program. Tanpa perencanaan yang matang, program pro-rakyat tidak akan terarah, terukur, atau berkelanjutan.

Melalui fungsi litbang dan inovasi, Bappeda menyediakan data, kajian, dan rekomendasi kebijakan yang mendukung program prioritas. Contoh:

- Kajian kebutuhan fasilitas kesehatan untuk mendukung NAGARI SEHAT
- Riset pengembangan kurikulum lokal untuk NAGARI PANDAI
- Inovasi teknologi pertanian untuk NAGARI KANYANG

Bapperida menjembatani kepentingan antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui musrenbang dan konsultasi publik, Bappeda memastikan bahwa program pro-rakyat benar-benar responsif terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat.

Bapperida bukan hanya “biro perencanaan” konvensional, tetapi merupakan motor perencanaan strategis yang memastikan bahwa seluruh program pro-rakyat tidak hanya terjabarkan dalam dokumen, tetapi juga terimplementasi dengan baik, terukur, dan berkelanjutan—sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan yang berpihak pada rakyat.

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta penunjang pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pesisir Selatan memegang peran kunci dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Dalam rangka menjalankan mandat tersebut, Bapperida telah menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025–2030.

IKU dirumuskan secara strategis dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas nasional, serta kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam mendukung implementasi program prioritas dan program pro-rakyat. Melalui pendekatan yang terukur, berbasis data, dan berorientasi outcome, IKU ini tidak hanya mencerminkan akuntabilitas kinerja institusi, tetapi juga menjadi panduan operasional dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.

4.2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. IKU disusun untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis berjalan secara terarah, terukur, dan dapat dievaluasi capaian kerjanya.

Sebagai instrumen utama pengukuran kinerja, IKU menggambarkan keterkaitan langsung antara visi, misi, serta sasaran pembangunan daerah dengan capaian nyata yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Melalui IKU, arah pembangunan dapat dimonitor secara periodik, sehingga memudahkan proses evaluasi, pengendalian, dan perbaikan kebijakan.

Dalam dokumen ini, IKU yang ditetapkan mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari kualitas perencanaan, konsistensi dokumen pembangunan, pemanfaatan hasil riset dan inovasi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Tabel berikut menyajikan secara rinci daftar Indikator Kinerja Utama beserta target capaian yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	-	-	75	80	85	90	95	
3.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	-	-	70	72	75	83	85	
4.	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Angka	24,19	24,42	24,6	24,8	25	25,2	25,4	

5.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	90,43	90,45	90,47	90,5	90,52	90,55	90,57	
6.	Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja	Angka	18,05	18,33	18,53	18,73	18,93	19,13	20	

4.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, dan evaluasi pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pesisir Selatan tidak secara langsung mengintervensi pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) makro melalui program-program internal. Namun, Bapperida memegang peran strategis sebagai *koordinator*, *fasilitator*, dan *pengendali* proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada pencapaian indikator-indikator makro tersebut.

Indikator kinerja kunci makro yang tercantum dalam dokumen ini merupakan ukuran kinerja pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor dan menjadi acuan bersama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Data yang disajikan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi bagian integral dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Pencapaian target indikator ini merupakan hasil sinergi dari seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, yang dikoordinasikan dan dimonitor secara berkelanjutan oleh Bapperida.

Tabel 4.7

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

Berikut adalah target indikator kinerja kunci makro Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode tahun 2025–2029:

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)

1.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,87	73,12	73,45	73,80	74,06	74,41	74,75	
2.	Angka Kemiskinan	Persen	7,49	6,08	5,66	5,30	5,10	4,70	4,35	
3.	Angka Pengangguran	Persen	5,06	4,49	4,39	4,33	4,27	4,21	4,07	
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Milliar Rupiah	8.183,1	4,37	5,60	6,88	7,16	7,27	5,73	
5.	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah/Orang/Tahun	NA	40,51	45,16	49,87	55,24	61,21	68,93	
6.	Gini Ratio	Angka	0,224	0,223	0,222	0,221	0,220	0,219	0,218	

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 disusun sebagai arah pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang terus berkembang, seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, diharapkan lebih mampu menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun dan adanya keselarasan dengan RPJMD dan RPJPD serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Rencana kegiatan anggaran (RKA) dan di lain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yaitu penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

Untuk mencapai tujuan Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, maka seluruh aparatur Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan dituntut untuk bekerja keras serta berbenah diri untuk:

1. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi.
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi.
4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah kedepan.
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Akhirnya, semoga Rencana Strategis yang disusun Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu **Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan** yang didukung oleh 5 (lima) misi dan mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Bapperida secara proporsional.

KEPALA BAPPERIDA,



HADI SUSILO, SSTP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001